

Optimalisasi Strategi Komunikasi Digital BPKH dalam Meningkatkan Transparansi dan Partisipasi Generasi Muda pada Tata Kelola Dana Haji di Indonesia

Elistiana

Universitas Terbuka

Email: elistianatian24@gmail.com

Elsa Mayori

Universitas Pakuan

Email: elsamayori2408@gmail.com

Koresponden Email: elistianatian24@gmail.com & elsamayori2408@gmail.com

Abstract:

This study examines the optimization of digital communication strategies implemented by Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) in enhancing transparency and youth participation in the governance of Hajj funds in Indonesia from an Islamic economics perspective. Using a qualitative approach with thematic analysis, the study analyzes official BPKH publications, including annual reports, financial statements, and digital communication channels. The findings indicate that although BPKH has demonstrated strong financial transparency and accountability in compliance with Sharia governance principles, its communication practices remain predominantly one-way, formal, and report-oriented. Such an approach is not aligned with the digital consumption patterns of Generation Z and Millennials, resulting in information asymmetry and limited public engagement. This condition potentially weakens the realization of the principles of *amanah* (trust) and *kashf al-hāl* (transparency) in the management of Islamic public funds. The study concludes that adopting an interactive, youth-oriented digital communication model is not merely a technical innovation but a strategic necessity to strengthen public trust, encourage meaningful participation, and ensure the sustainability of Hajj fund governance. Practical implications include platform-specific communication strategies, narrative framing based on Islamic values, and collaborative engagement with young Muslim content creators.

Keywords: *Digital Communication; Hajj Fund Governance; Transparency; Youth Participation; Islamic Economics*

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji optimalisasi strategi komunikasi digital yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam meningkatkan transparansi dan partisipasi generasi muda pada tata kelola dana haji di Indonesia, ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis tematik terhadap publikasi resmi BPKH, meliputi laporan tahunan, laporan keuangan, serta kanal komunikasi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BPKH telah menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi sesuai prinsip tata kelola syariah, pola komunikasinya masih didominasi pendekatan satu arah, formal, dan berbasis laporan teknis. Pola ini belum selaras dengan karakteristik dan preferensi konsumsi digital Generasi Z dan Milenial, sehingga memunculkan asimetri informasi dan rendahnya keterlibatan publik. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan implementasi prinsip *amanah* dan *kashf al-hāl* (transparansi) dalam pengelolaan dana publik Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan model komunikasi digital yang interaktif dan berorientasi pada generasi muda bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan kebutuhan strategis untuk memperkuat kepercayaan publik, mendorong partisipasi bermakna, dan menjamin keberlanjutan tata kelola dana haji. Implikasi praktis penelitian ini mencakup pengembangan strategi komunikasi berbasis platform, penguatan narasi bernilai Islam, serta kolaborasi dengan kreator konten Muslim muda.

Kata Kunci: *Komunikasi Digital; Tata Kelola Dana Haji; Transparansi; Partisipasi Generasi Muda; Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Pengelolaan dana haji di Indonesia merupakan bagian strategis dari sistem keuangan publik yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan keagamaan. Dana yang bersumber dari setoran calon jemaah haji terus meningkat seiring dengan panjangnya daftar tunggu, sehingga menuntut tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pengembangan, dan pelaporan dana haji kepada publik. Kajian terdahulu menunjukkan bahwa pembentukan BPKH merupakan upaya negara untuk memperkuat legitimasi dan efektivitas tata kelola dana haji melalui pemisahan fungsi regulasi dan pengelolaan keuangan (Mubarak & Fuhaidah, 2018).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa secara normatif dan administratif, BPKH telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan keuangan berkala, audit eksternal, serta pemanfaatan sistem informasi keuangan haji. (Judijanto, 2025) menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan pengelolaan dana haji oleh BPKH tergolong tinggi dan sejalan dengan standar *good governance*, ditandai dengan opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun demikian, penelitian tersebut juga mengindikasikan bahwa tantangan masih muncul dalam aspek penyampaian informasi yang mudah dipahami dan merata bagi seluruh pemangku kepentingan, khususnya calon jemaah haji.

Dalam konteks tata kelola modern, transparansi tidak hanya dimaknai sebagai ketersediaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup bagaimana informasi tersebut dikomunikasikan kepada publik. Studi mengenai *open government* menegaskan bahwa keterbukaan informasi harus diiringi dengan keterbukaan partisipatif agar masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses tata kelola (Meijer et al., 2012). (Bertot et al., 2010) menambahkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial berpotensi memperluas jangkauan transparansi, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada desain komunikasi dan karakteristik audiens.

Perubahan pola konsumsi informasi di era digital menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga publik. Generasi muda, khususnya Generasi Z dan Milenial, cenderung mengakses informasi melalui media digital yang bersifat visual, interaktif, dan dialogis. (Loader et al., 2014) serta (OECD, 2020) menekankan bahwa partisipasi generasi muda dalam tata kelola publik sangat dipengaruhi oleh sejauh mana institusi mampu menyesuaikan strategi komunikasinya dengan preferensi digital kelompok ini. Dalam konteks Indonesia, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan generasi muda, meskipun tingkat adopsi teknologi digital tinggi, menunjukkan adanya kesenjangan antara akses informasi dan pemahaman substantif (Hayati & Pertiwi, 2025).

Penelitian terkait persepsi publik terhadap BPKH menunjukkan bahwa komunikasi institusional memainkan peran penting dalam membentuk kepercayaan masyarakat. (Mada et al., 2025) menemukan bahwa meskipun BPKH memiliki kinerja keuangan yang relatif baik, tingkat kesadaran dan kepercayaan publik masih bersifat moderat akibat keterbatasan eksposur dan efektivitas komunikasi resmi. Temuan ini sejalan dengan studi komunikasi pemerintahan yang menekankan pentingnya perencanaan konten digital yang adaptif, berorientasi audiens, dan konsisten dengan kebutuhan publik (Zharfan et al., 2024).

Berdasarkan kajian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara capaian transparansi administratif BPKH dan efektivitas strategi komunikasi digital dalam mendorong partisipasi generasi muda. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek hukum, investasi, dan akuntabilitas dana haji, sementara kajian yang secara khusus menempatkan komunikasi digital sebagai instrumen penghubung antara transparansi dan partisipasi generasi muda masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi strategi komunikasi digital BPKH melalui kajian konseptual mengenai perannya dalam menjembatani transparansi kelembagaan dan partisipasi generasi muda pada tata kelola dana haji di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kajian literatur (*literature-based qualitative study*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara mendalam konsep, temuan, dan pola argumentasi yang berkembang dalam kajian akademik terkait transparansi, komunikasi digital, partisipasi generasi muda, serta tata kelola dana haji di Indonesia. Kajian literatur ini dilengkapi dengan analisis terhadap dokumen publik dan kanal komunikasi digital resmi BPKH, seperti laporan tahunan dan publikasi daring, untuk memperkuat konteks kelembagaan dalam pembahasan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami bagaimana strategi

komunikasi digital berperan sebagai instrumen penghubung antara transparansi kelembagaan dan partisipasi publik, khususnya generasi muda, dalam konteks pengelolaan dana haji.

Sumber Data

Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan topik penelitian. Artikel jurnal yang digunakan dipilih dari jurnal nasional dan internasional yang membahas empat klaster utama, yaitu: (1) tata kelola dan transparansi pengelolaan dana haji; (2) komunikasi publik dan transparansi digital; (3) persepsi publik dan kepercayaan terhadap lembaga pengelola dana haji; serta (4) partisipasi generasi muda dan literasi keuangan syariah di era digital. Seluruh sumber data merupakan publikasi ilmiah yang dapat diakses secara terbuka dan memiliki relevansi langsung dengan fokus kajian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji secara sistematis artikel-artikel ilmiah yang telah dipilih. Setiap artikel dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kerangka teoritis, metode yang digunakan, serta temuan utama yang berkaitan dengan transparansi, komunikasi digital, dan partisipasi generasi muda. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai perkembangan kajian serta posisi penelitian ini dalam lanskap penelitian yang ada.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik (*thematic analysis*). Tahapan analisis meliputi: (1) pengelompokan literatur berdasarkan tema utama penelitian; (2) identifikasi konsep kunci dan pola temuan yang berulang; (3) perbandingan antarhasil penelitian untuk menemukan kesamaan, perbedaan, dan celah penelitian; serta (4) sintesis temuan untuk merumuskan kerangka analitis mengenai optimalisasi strategi komunikasi digital dalam tata kelola dana haji. Analisis tematik dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan makna di balik temuan empiris dan konseptual secara mendalam tanpa terikat pada pengujian hipotesis statistik.

Kriteria dan Alur Kajian

Kriteria pemilihan literatur dalam penelitian ini meliputi relevansi topik dengan fokus penelitian, kejelasan metodologi, serta kontribusi terhadap pemahaman transparansi, komunikasi digital, dan partisipasi generasi muda. Alur kajian dimulai dari analisis tata kelola dan transparansi dana haji, dilanjutkan dengan kajian komunikasi digital dan persepsi publik, kemudian dihubungkan dengan karakteristik serta partisipasi generasi muda. Melalui alur ini, penelitian berupaya menyusun pemahaman integratif mengenai peran strategis komunikasi digital dalam memperkuat transparansi dan partisipasi pada tata kelola dana haji di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa pengelolaan dana haji di Indonesia oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara normatif telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas kelembagaan. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa BPKH secara konsisten menyajikan laporan keuangan berkala, menjalani audit eksternal, serta mengembangkan sistem informasi keuangan haji yang memungkinkan pemantauan dana secara lebih terbuka (Mubarak & Fuhaidah, 2018). Temuan ini memperlihatkan bahwa dari sisi tata kelola administratif dan kepatuhan regulasi, BPKH telah berada pada jalur *good governance* dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana publik (Judijanto, 2025).

Namun demikian, hasil kajian juga mengungkap adanya perbedaan antara transparansi administratif dan transparansi komunikatif. (Judijanto, 2025) mencatat bahwa meskipun tingkat keterbukaan informasi BPKH tergolong tinggi, penyampaian informasi tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek keterjangkauan dan pemahaman publik. Informasi keuangan yang disajikan cenderung berbentuk laporan teknis dan narasi formal, sehingga sulit dipahami oleh sebagian masyarakat, terutama kelompok non-teknis dan generasi muda. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum sepenuhnya diiringi dengan efektivitas komunikasi publik yang mampu menjangkau audiens secara luas.

Temuan tersebut sejalan dengan sintesis penelitian transparansi sektor publik yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi secara formal tidak secara otomatis menghasilkan peningkatan kepercayaan publik. (Cucciniello et al., 2017) menegaskan bahwa transparansi baru akan berdampak signifikan terhadap trust dan legitimasi institusi ketika informasi yang disediakan

bersifat mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan audiens, serta dikomunikasikan melalui mekanisme yang memungkinkan interaksi dan klarifikasi. Dengan demikian, transparansi yang bersifat administratif tanpa dukungan strategi komunikasi yang efektif berpotensi menciptakan ilusi keterbukaan tanpa keterlibatan publik yang nyata.

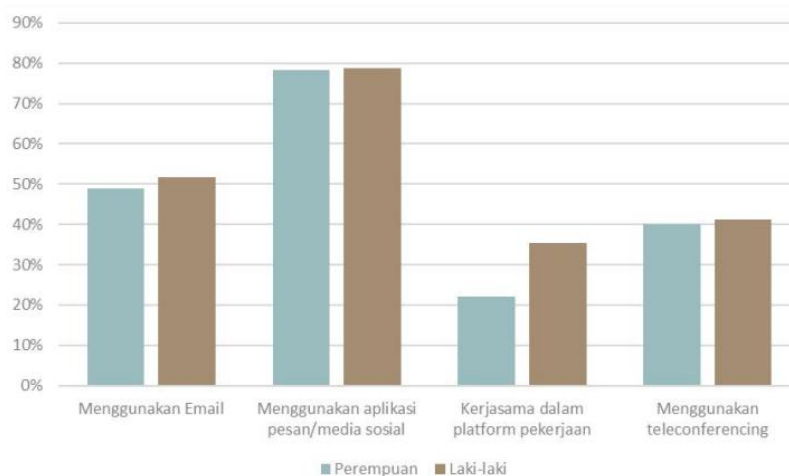
Untuk memperdalam analisis kesenjangan tersebut, penting untuk melihat bagaimana praktik transparansi digital dalam keuangan publik syariah dikembangkan. (Febriyanti, 2024) menegaskan bahwa transparansi dalam keuangan syariah tidak cukup dimaknai sebagai keterbukaan data, tetapi juga mencakup kemampuan institusi dalam menerjemahkan informasi kompleks ke dalam bentuk komunikasi yang mudah dipahami publik. Transformasi digital berperan sebagai jembatan antara ketersediaan informasi dan pemahaman masyarakat, terutama melalui penyajian konten visual, narasi sederhana, dan mekanisme komunikasi yang memungkinkan klarifikasi. Dalam konteks ini, transparansi komunikatif menjadi elemen kunci untuk mengurangi asimetri informasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana syariah.

Kajian mengenai komunikasi digital memperkuat temuan tersebut. (Bertot et al., 2010) menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial oleh lembaga publik berpotensi meningkatkan transparansi hanya jika dirancang sebagai sarana komunikasi yang interaktif dan partisipatif. (Meijer et al., 2012) menambahkan bahwa keterbukaan dalam tata kelola publik harus mencakup dua dimensi utama, yaitu *vision* (ketersediaan informasi) dan *voice* (ruang partisipasi dan dialog). Dalam konteks BPKH, hasil kajian menunjukkan bahwa dimensi *vision* telah relatif terpenuhi melalui publikasi laporan dan sistem informasi, sementara dimensi *voice* masih terbatas karena minimnya ruang interaksi dua arah antara lembaga dan publik.

Hubungan antara keterbatasan ruang partisipasi digital dan tingkat kepercayaan publik juga ditegaskan dalam kajian e-participation. (Kim & Lee, 2012) menunjukkan bahwa partisipasi digital yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, memberikan masukan, dan memperoleh respons dari institusi publik berperan sebagai mediator penting antara transparansi dan kepercayaan. Dalam konteks ini, absennya mekanisme komunikasi dua arah berpotensi membatasi fungsi transparansi sebagai sarana pembentukan trust, khususnya di kalangan generasi muda yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap keterlibatan digital dalam tata kelola publik.

Temuan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan karakteristik generasi muda. (Loader et al., 2014) serta (OECD, 2020) menegaskan bahwa generasi muda cenderung terlibat dalam isu publik melalui platform digital yang memungkinkan dialog, umpan balik, dan keterlibatan aktif. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia memperlihatkan bahwa penggunaan platform digital untuk komunikasi dan kolaborasi berlangsung secara luas dan lintas kelompok masyarakat, termasuk berdasarkan perbedaan gender.

Gambar 1.
Persentase Masyarakat Menggunakan Platform Digital untuk Komunikasi dan Kolaborasi berdasarkan Gender



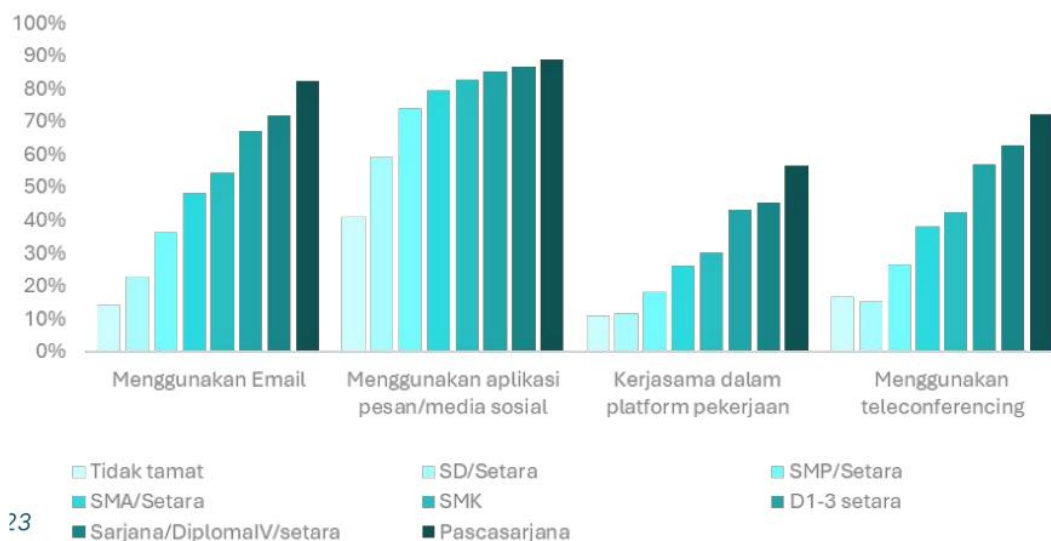
Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (2024)

Selain itu, preferensi penggunaan platform digital juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan tertentu cenderung lebih aktif memanfaatkan platform digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, sementara kelompok

lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam pemanfaatan kanal digital secara optimal. Kondisi ini berimplikasi pada cara masyarakat mengakses dan memahami informasi publik, termasuk informasi terkait tata kelola dana haji.

Gambar 2.

Persentase Masyarakat Menggunakan Platform Digital untuk Komunikasi dan Kolaborasi berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (2024)

Kesenjangan antara tingginya intensitas penggunaan platform digital dan rendahnya pemahaman substantif generasi muda terhadap isu keuangan syariah menunjukkan bahwa akses teknologi belum otomatis berbanding lurus dengan literasi. (Shaffina et al., 2024) menemukan bahwa transparansi informasi yang disampaikan melalui media digital memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan pengguna, khususnya ketika informasi tersebut disajikan secara terbuka, konsisten, dan mudah dipahami. Temuan ini mengindikasikan bahwa bagi generasi muda, transparansi tidak hanya dinilai dari ketersediaan data, tetapi juga dari cara institusi membangun komunikasi yang relevan dengan kebiasaan digital mereka.

Dalam konteks BPKH, temuan tersebut menjelaskan mengapa strategi komunikasi yang masih bertumpu pada saluran formal dan laporan teknis berpotensi kurang efektif dalam menjangkau generasi muda. Rendahnya eksposur informasi BPKH di media sosial serta keterbatasan konten yang bersifat dialogis menyebabkan partisipasi generasi muda dalam isu tata kelola dana haji masih relatif terbatas, meskipun secara administratif informasi telah tersedia.

Penelitian tentang persepsi publik terhadap BPKH memperkuat temuan tersebut. (Mada et al., 2025) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepercayaan publik terhadap BPKH berada pada level moderat, meskipun lembaga ini memiliki kinerja keuangan yang baik. Temuan ini menegaskan bahwa kepercayaan publik tidak hanya ditentukan oleh capaian kinerja dan kepatuhan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi institusional dalam membangun narasi, menyediakan ruang dialog, dan merespons kebutuhan publik.

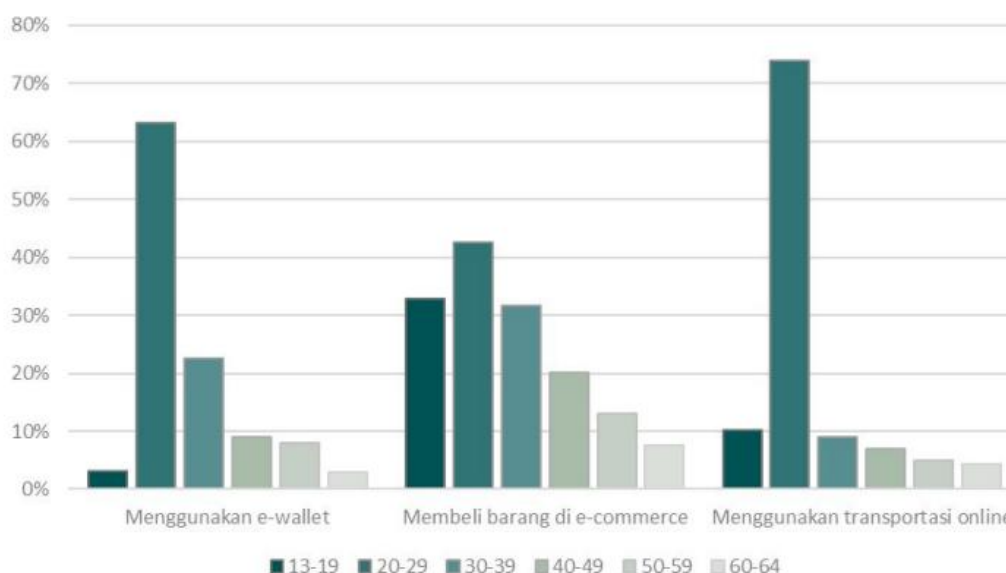
Lebih lanjut, kajian literasi keuangan syariah mengungkap adanya kesenjangan antara tingginya adopsi teknologi digital dan rendahnya pemahaman substantif generasi muda terhadap pengelolaan keuangan syariah. (Hayati & Pertiwi, 2025) menemukan bahwa konten edukasi keuangan syariah yang tersedia secara digital masih cenderung bersifat deskriptif, informatif satu arah, dan minim elemen interaksi, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan karakteristik audiens muda yang lebih responsif terhadap konten visual, naratif, dan partisipatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan informasi digital belum otomatis menjamin terjadinya proses literasi yang mendalam, terutama dalam isu keuangan syariah yang memiliki kompleksitas konsep dan terminologi khusus.

Di sisi lain, data Indeks Masyarakat Digital Indonesia memperlihatkan bahwa kelompok usia muda merupakan pengguna platform digital yang paling intensif dalam berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi dan keuangan. Intensitas penggunaan yang tinggi ini mengindikasikan adanya potensi strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh lembaga publik dalam membangun pemahaman dan keterlibatan generasi muda. Kesenjangan antara tingginya aktivitas

digital dan rendahnya literasi keuangan syariah tersebut menegaskan bahwa tantangan utama terletak pada strategi komunikasi, bukan pada keterbatasan akses teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komunikasi digital yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu mengonversi aktivitas digital generasi muda menjadi proses pembelajaran, dialog, dan partisipasi yang bermakna.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya paradoks dalam pemanfaatan teknologi digital di kalangan generasi muda, yaitu tingginya intensitas penggunaan platform digital yang tidak diiringi dengan peningkatan pemahaman substantif terhadap isu keuangan syariah. Data Indeks Masyarakat Digital Indonesia menunjukkan bahwa kelompok usia muda tidak hanya aktif secara sosial, tetapi juga terlibat intensif dalam aktivitas ekonomi berbasis digital. Namun, keterlibatan ini lebih banyak bersifat fungsional dan transaksional, bukan reflektif atau deliberatif terhadap aspek tata kelola dan pengelolaan dana publik. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa strategi komunikasi yang dirancang secara edukatif dan partisipatif, aktivitas digital generasi muda berpotensi berhenti pada tingkat konsumsi informasi, tanpa berkembang menjadi keterlibatan kritis dan kesadaran tata kelola.

Gambar 3.
Persentase Masyarakat Menggunakan Platform Digital Lebih dari Satu Kali untuk Aktivitas Ekonomi berdasarkan Usia



Sumber: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika (2024)

Dalam perspektif ekonomi syariah, prinsip *amanah* (kepercayaan) dan *kashf al-hāl* (transparansi) tidak hanya menuntut ketersediaan informasi, tetapi juga pemahaman dan keterlibatan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi komunikasi digital yang interaktif dan dialogis sejatinya merupakan turunan operasional dari prinsip-prinsip tersebut. Pengalaman lembaga filantropi Islam seperti Badan Amil Zakat Nasional menunjukkan bahwa pemanfaatan media sosial secara aktif, disertai dengan laporan publik yang komunikatif dan responsif, mampu memperkuat kredibilitas lembaga dan kepercayaan khalayak digital (Saputri et al., 2025). Dalam konteks BPKH, pendekatan serupa dapat diterapkan melalui pengembangan konten edukatif berbasis visual, sesi interaksi langsung dengan pakar keuangan syariah, serta penyediaan ruang umpan balik publik yang terintegrasi dengan platform digital yang akrab bagi generasi muda sebagaimana tercermin dalam tingginya intensitas penggunaan platform digital pada kelompok usia ini.

Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama dalam tata kelola dana haji bukan terletak pada ketiadaan transparansi, melainkan pada kesenjangan antara transparansi administratif dan partisipasi publik, khususnya generasi muda. Strategi komunikasi digital BPKH masih berorientasi pada penyampaian informasi satu arah dan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai instrumen partisipatif. Temuan ini memperkaya kajian tata kelola dana haji

dengan menempatkan komunikasi digital sebagai variabel strategis yang menghubungkan transparansi kelembagaan dan keterlibatan generasi muda. Dengan demikian, optimalisasi strategi komunikasi digital dapat dipahami bukan sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai kebutuhan struktural untuk memperkuat legitimasi, kepercayaan publik, dan keberlanjutan tata kelola dana haji di Indonesia.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) secara administratif telah memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, namun masih menghadapi tantangan dalam menjangkau dan melibatkan generasi muda melalui strategi komunikasi digital yang efektif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan komunikasi digital sebagai variabel strategis yang menjembatani transparansi kelembagaan dan partisipasi generasi muda dalam tata kelola dana haji, bukan sekadar sebagai sarana penyampaian informasi. Hasil kajian menunjukkan adanya kesenjangan antara keterbukaan informasi berbasis laporan teknis dan kebutuhan komunikasi yang interaktif, dialogis, serta sesuai dengan karakteristik konsumsi digital generasi muda. Oleh karena itu, optimalisasi strategi komunikasi digital BPKH perlu diarahkan pada pengembangan pendekatan berbasis platform, penyusunan narasi yang mudah dipahami dan relevan, serta penciptaan ruang partisipasi publik yang lebih inklusif. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris respons dan perilaku generasi muda terhadap inovasi komunikasi digital BPKH, serta mengeksplorasi integrasi komunikasi digital dengan kebijakan tata kelola dana haji secara lebih komprehensif. Temuan ini memberikan implikasi praktis bagi BPKH dalam merancang strategi komunikasi digital yang lebih partisipatif dan selaras dengan karakteristik generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika. (2024). Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2022-2023. In *Satu Kata Komdigi*. <https://imdi.sdmdigital.id/>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Cucciniello, M., Porumbescu, G. A., & Grimmelikhuijsen, S. (2017). 25 Years of Transparency Research: Evidence and Future Directions. *Public Administration Review*, 77(1), 32–44. <https://doi.org/10.1111/puar.12685>
- Febriyanti, R. N. (2024). Transparansi Digital Dalam Keuangan Publik Syariah : Peran Teknologi Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Transparansi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 6(01), 69–76.
- Hayati, F. K., & Pertiwi, R. R. (2025). Sharia Financial Literacy in the Digital Era: The Role of the Younger Generation in Embracing the Transformation of Islamic Finance. *Suhuf*, 37(2), 345–352. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v37i2.11170>
- Judijanto, L. (2025). Transparency and Accountability in the Management of Hajj Funds By Bpkh: a Literature Review. *International Journal of Economic Literature (INJOLE)*, 3(6), 781–789.
- Kim, S., & Lee, J. (2012). E-Participation, Transparency, and Trust in Local Government. *Public Administration Review*, 72(6), 819–828. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02593.x>
- Loader, B. D., Vromen, A., & Xenos, M. A. (2014). The networked young citizen: social media, political participation and civic engagement. *Information, Communication & Society*, 17(2), 143–150. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.871571>
- Mada, U. G., Qoyimah, N., Abrar, A. N., & Ahmad, N. (2025). Examining Communication Factor and Public Perception of BPKH in Managing Hajj Funds. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(10), 7721–7727. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i10-20>
- Meijer, A. J., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2012). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 78(1), 10–29. <https://doi.org/10.1177/0020852311429533>
- Mubarak, M. A., & Fuhaidah, U. (2018). Manajemen Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia (Studi Kolaborasi Antar Lembaga Bpkh, Kemenag Dan Mitra Keuangan Dalam Pengelolaan Dana Haji). *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, 2(2), 44–66.
- OECD Publishing. (2020). Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions. In

Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions.
<https://doi.org/10.1787/339306da-en>

- Saputri, I. D., Oktarinah, A., Suhandi, F. N., & Riska, A. F. (2025). Analisis Strategi Komunikasi Digital Public Relations BAZNAS dalam Menumbuhkan Kredibilitas di Era Media Sosial. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(1), 126–132. <https://ejournal.amirulbangunbangsapublishing.com/index.php/jpnmb/article/view/480>
- Shaffina, T. I., Putri Nisrina Nurfitri P, Salsabila, A., & Nurhasanah, N. (2024). Pengaruh Transparansi terhadap Kepercayaan dalam Berinfraq Menggunakan Dompot Digital. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 153–160. <https://doi.org/10.29313/jres.v4i2.4354>
- Zharfan, S. Z., Rudiana, & Centia, S. (2024). Perencanaan Komunikasi Pemerintahan Dalam Pengelolaan Konten Media Sosial Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Diskominfo Jabar. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Pu*, 7, 241.